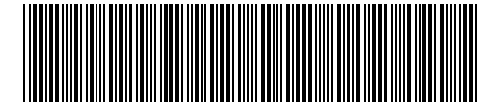




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408779/2020**



DS:3849-7145-0434-2325

Revisi ke 05

Tanggal : 27 November 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (19) | SULAWESI SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408779) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
| Sebesar | : Rp. | 2.878.060.000 (DUA MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	2.878.060.000
Rp.	2.878.060.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.878.060.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN MAKASSAR II | (136) Rp. | 2.878.060.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3849-7145-0434-2325

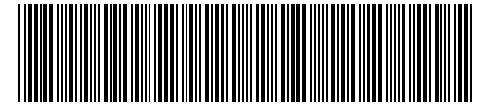
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Harun Sulianto
Bendahara Pengeluaran : SAFRI
Pejabat Penanda Tangan SPM : SIRAJUDDIN

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		2.878.060.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		2.878.060.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		2.878.060.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar H	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional		
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar Hu	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1 Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		2.878.060.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin		
	03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah		
	05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		
	06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		
Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	436 Orang	2.016.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00 Orang	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Harun Sulianto
Bendahara Pengeluaran : SAFRI
Pejabat Penanda Tangan SPM : SIRAJUDDIN

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	91 Kegiatan	473.060.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00 Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah	80.000.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33 Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah	155.000.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33 Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah	77.000.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33 Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	77.000.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33 Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

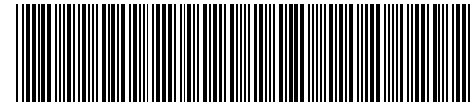
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020

I B. SUMBER DANA



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah					
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	2.878.060.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.878.060.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020

II. RINCIAN PENGELUARAN



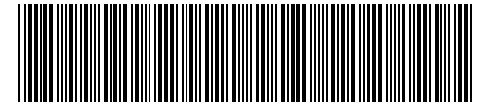
DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	2.878.060	-	-	-	2.878.060		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	2.878.060	-	-	-	2.878.060		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	2.878.060	-	-	-	2.878.060		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	2.016.000	-	-	-	2.016.000	19 . 51	
01	RM	-	2.016.000	-	-	-	2.016.000	136	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	473.060	-	-	-	473.060	19 . 51	
01	RM	-	473.060	-	-	-	473.060	136	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	80.000	-	-	-	80.000	19 . 51	
01	RM	-	80.000	-	-	-	80.000	136	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	155.000	-	-	-	155.000	19 . 51	
01	RM	-	155.000	-	-	-	155.000	136	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	77.000	-	-	-	77.000	19 . 51	
01	RM	-	77.000	-	-	-	77.000	136	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	77.000	-	-	-	77.000	19 . 51	
01	RM	-	77.000	-	-	-	77.000	136	
JUMLAH		-	2.878.060	-	-	-	2.878.060		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

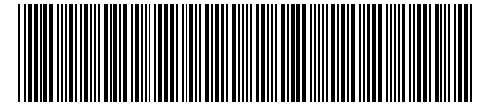
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	12.957	87.364	282.750	191.570	228.415	270.084	23.935	35.707	877.354	484.695	383.229	2.878.060
		52 BELANJA BARANG	0	12.957	87.364	282.750	191.570	228.415	270.084	23.935	35.707	877.354	484.695	383.229	2.878.060
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	12.957	87.364	282.750	191.570	228.415	270.084	23.935	35.707	877.354	484.695	383.229	2.878.060
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	12.957	87.364	282.750	191.570	228.415	270.084	23.935	35.707	877.354	484.695	383.229	2.878.060

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
IV A. B L O K I R**



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

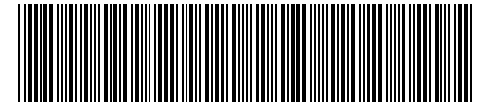
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:3849-7145-0434-2325

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003